

Evaluasi Perencanaan Dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi Di Indonesia (Reformasi Birokrasi Tematik)

by Aditya Ari Nugroho, Munawar Noor, Charis Christiani

Submission date: 30-Jan-2024 08:29AM (UTC+0700)

Submission ID: 2281677579

File name: document.pdf (242.41K)

Word count: 3786

Character count: 25585



Evaluasi Perencanaan Dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi Di Indonesia (Reformasi Birokrasi Tematik)

Aditya Ari Nugroho¹, Munawar Noor², Charis Christiani³

UNTAG Semarang

Jl. Pawiyatan luhur Bendan Duwur Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: indra-kertati@untagsmg.ac.id¹, charis-christiani@untagsmg.ac.id³

Abstract

The bureaucratic reform process that began with the arrangement of the Grand Design (Grand Design) regarding the 2010-2025 Bureaucratic Reform (Grand Design Administration Reform 2010-2025) has been included in Presidential Regulation No. Bureaucratic reform is a political process designed to adjust the relationship between the bureaucracy and other elements in society, such as civil society and the private sector, as well as within the bureaucracy itself. In this grand design, the reform Road Map has been divided into 3 (three) phases every five years which contain strategic goals. It doesn't feel like the Grand Design of Bureaucratic Reform has entered its last stage or third period, in this last period the goal to be achieved is to continuously increase bureaucratic capacity as a continuation of bureaucratic reform in stage II until finally the ultimate goal is to create world-class government. However, many are of the opinion that in Stage I and Stage II there has been no significant impact, whether Bureaucratic Reform in Indonesia can be said to be "Going in Place". In this third stage, the PANRB Ministry launched Temtik Bureaucratic Reform with four focuses, namely: 1. Poverty Alleviation; 2. Investment Increase; 3. Acceleration of the President's Actual Priorities; 4. Digitalization of Government Administration. Bureaucratic Reform is expected to answer President Joko Widodo's wishes and mandate for Bureaucratic Reform that has an impact on society and development.

Keywords: *Bureaucratic Reform, Grand Design, Road Map, Thematic Bureaucratic Reform*

Abstrak

Proses reformasi birokrasi yang dimulai dengan penyusunan Desain Besar (grand design) mengenai Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Grand Design Administrative Reform 2010-2025) telah dituangkan ke dalam Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 dengan tujuan besarnya untuk menciptakan birokrasi berkelas dunia di tahun 2025. Reformasi birokrasi merupakan sebuah proses politik yang di desain untuk menyesuaikan hubungan antara birokrasi dan elemen-elemen lain dalam masyarakat, seperti masyarakat sipil dan swasta, maupun di dalam birokrasi itu sendiri. Dalam desain besar tersebut, Road Map reformasi telah dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap setiap lima tahunan yang memuat sasaran-sasaran strategis. Tidak terasa Grand Design Reformasi Birokrasi tersebut telah memasuki pada tahap terakhir atau periode ketiga, pada periode terakhir ini sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan secara terus menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada tahap II hingga akhirnya tujuan akhir untuk mewujudkan pemerintah kelas dunia. Namun banyak berpendapat bahwa pada Tahap I

dan Tahap II dinilai belum ada dampak yang signifikan, apakah Reformasi Birokrasi di Indonesia bisa dikatakan “Jalan di Tempat”. Pada tahap ketiga ini Kementerian PANRB mencanangkan Reformasi Birokrasi Tematik dengan empat focus yaitu: 1. Pengentasan Kemiskinan; 2. Peningkatan Investasi; 3. Percepatan Prioritas Aktual Presiden; 4. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Reformasi Birokrasi diharapkan menjawab keinginan dan amanat Bapak Presiden Joko Widodo untuk Reformasi Birokrasi yang berdampak pada masyarakat dan pembangunan.

Kata kunci: Reformasi Birokrasi, Grand Design, Road Map, Reformasi Birokrasi Tematik

I. LATAR BELAKANG

Istilah Reformasi Birokrasi memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat maupun pemerintah. Hal ini berkaitan dengan tuntutan masyarakat agar pemerintah segera mereformasi birokrasinya sesuai pernyataan Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan lima visi Indonesia Maju sebagai arah kebijakannya di periode kedua pemerintahannya di Sentul 14 Juli 2019.

Visi yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini diharapkan dapat membawa Indonesia dalam menghadapi tantangan fenomenal global yang dinamis, cepat, kompleks, beresiko dan penuh kejutan/fenomena VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity). Salah satu visi yang disampaikan adalah Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata Kelola pemerintahan yang baik. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional negara tersebut. Hasil yang di-harapkan ¹ dari reformasi birokrasi adalah ter-ciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN (korupsi, Kolusi, Nepotisme) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program reformasi birokrasi. Hal ini jelas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, bahwa kecepatan melayani serta birokrasi akuntabel, efektif, dan efisien menjadi kunci bagi terwujudnya reformasi birokrasi kita.

Dari sudut pandang masyarakat, birokrasi selama ini dianggap sebagai sesuatu yang menyulitkan, berbelit-belit, dan tidak profesional, biaya tinggi dan sarat dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. ⁶ Terjadinya kesan negatif dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah/birokrasi diakibatkan karena birokrasi selama ini tidak dapat

merespon keinginan warga masyarakat. Konsep lama birokrasi kemudian dinilai tidak lagi mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat yang sangat pesat sehingga birokrasi tidak lagi mampu memenuhi tuntutan masyarakat tersebut. Birokrasi lama yang didesain untuk bekerja lambat, berhati-hati, dan metodologis sudah tidak dapat diterima oleh konsumen yang memerlukan pelayanan cepat, efisien, tepat waktu, dan simpel (sederhana). Sehingga Reformasi Birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparturnya dapat berkualitas lebih baik lagi.

Guna pelaksanaan reformasi birokrasi, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan beberapa pedoman teknis penerapan reformasi birokrasi. Di samping itu masih ada banyak lagi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang merupakan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, ¹ Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map Reformasi Birokrasi nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024 telah masuk pada tahap ¹ ketiga atau periode terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara merupakan Kementerian yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, salah satu visi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi. Terbaru dalam usahanya meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melalui arahan Presiden Joko Widodo yaitu Reformasi Birokrasi harus berdampak langsung terhadap masyarakat dan pembangunan, telah di launching Reformasi Birokrasi Tematik yang dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.

⁴ Terdapat empat hal yang menjadi fokus dari program RB tematik ini. Fokus tersebut adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual Presiden. Untuk program

prioritas Presiden terbagi menjadi dua, yakni peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian laju inflasi.

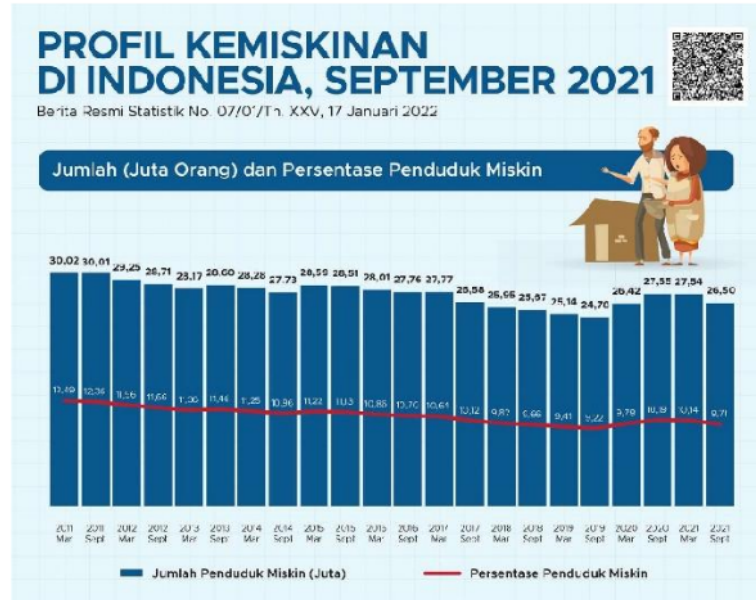
Melalui program RB tematik ini, diharapkan instansi pemerintah dapat menjalankan program dengan fokus pada penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat melalui keempat fokus tersebut. Sehingga, dampak RB yang dilakukan oleh pemerintah, terasa dan berdampak di lapisan masyarakat. Sebelum dilaksanakannya reformasi birokrasi tematik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menggencarkan Pembangunan Mall Pelayanan Publik. Mall Pelayanan Publik merupakan wujud akselerasi pemerintah dalam menyediakan satu tempat pelayanan yang terintegrasi. Dengan MPP, masyarakat bisa dengan mudah mengurus berbagai layanan barang, jasa dan administrasi, baik dari sektor perizinan maupun non-perizinan.

Permasalahan

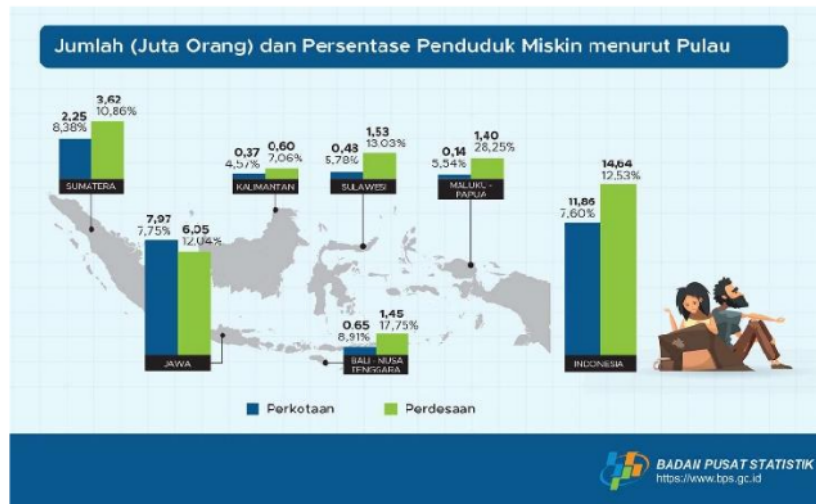
Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir tersebut, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Periodisasi perjalanan Reformasi Birokrasi di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan paradigma ilmu administrasi dan tata Kelola pemerintahan yang berkembang di dunia. Upaya perbaikan tata kelola pemerintah dilakukan dengan mencari paradigma terbaik yang dapat dipraktikkan di lapangan. Secara umum, Indonesia mengarah pada praktik paradigma *New Public Management*, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi padahasil, serta *New Public Service (Governance)* yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media masa. Meskipun demikian, pada beberapa kondisi Indonesia masih menerapkan beberapa praktik birokrasi *weberian*, khususnya dalam mengelola pelayanan yang bersifat strategis dan terkait dengan kedaulatan negara. Sehingga muncul Mall Pelayanan Publik yang dimana merupakan usaha Pemerintah untuk memberikan masyarakat kemudahan untuk mendapatkan pelayanan.

Selain Mall Pelayanan Publik, terdapat Reformasi Birokrasi Tematik sebagai wujud Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam menerjemahkan arahan presiden untuk Reformasi Birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat dan pembangunan. Reformasi Birokrasi Tematik tersebut, terdapat focus antara lain: 1.) Penanggulangan Kemiskinan, Tata Kelola birokrasi agar besarnya anggaran kemiskinan berdampak optimal pada angka penurunan kemiskinan. Sembilan Pemda menjadi *pilot project* pada tahap pertama, dan 23 Pemda pada tahap kedua; 2.) Peningkatan Investasi, Reformasi Birokrasi memperkuat penerapan omnibus law, meningkatkan competitiveness index, untuk melipatgandakan investasi menjadi indeks reformasi birokrasi bagi Kementria/Lembaga/Pemda; 3.) Perepatan Prioritas Aktual Presiden, Penguatan tata Kelola birokrasi merespons dan mengawal hal-hal mendesak sesuai arahan Bapak Presiden, sehingga dapat memitigasi resiko yang berdampak serius pada masyarakat; 4.) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Terciptanya birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital untuk memudahkan rakyat, berbasis struktur digital, budaya digital, dan kompetensi digital pada birokrasi.

Selama ini reformasi birokrasi hanya focus pada sisi hulu, yakni melakukan perbaikan system dan manajemen internal instansi pemerintah untuk menyelesaikan tata Kelola birokrasi. Hal itu dinilai kurang berdampak ke masyarakat. anggaran pengentasan kemiskinan yang mencapai Rp 500 triliun di berbagai kementerian/lembaga belum mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. dana tersebut lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan perjalanan dinas, seminar, dan sebagainya, bukan fokus untuk mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia dirasa masih tinggi data yang diperoleh oleh BPS.



Gambar 1. Profil Kemiskinan di Indonesia September 2021



Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau

Berdasarkan data diatas, Jumlah Penduduk miskin di Indonesia yaitu 26,50 Juta Jiwa dengan presentase 9,71%. Sedangkan penduduk miskin menurut pulau pada perkotaan sejumlah 11,86 juta jiwa dengan presentase 7,60%, pada perdesaan sejumlah 14,64 juta jiwa dengan 12,53%. Permasalahannya adalah, dengan adanya reformasi

brokrasi tematik saat ini yang salah satu fokusnya yaitu pengentasan kemiskinan. Apakah akan berdampak terhadap perbaikan kondisi kemiskinan di Indonesia.

Tujuan

Tujuan penulisan artikel ini untuk menunjukkan serangkaian penjelasan antara lain: Menganalisis Implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi apakah sudah tepat guna dan berdampak; Menganalisis pengaruh adanya Reformasi Birokrasi Tematik, khususnya Pengentasan Kemiskinan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan.

Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami (Sugiyono, 2018).

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan focus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan.

Penelitian kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara, studi dokumen. Sedangkan kesahihan dan keterandalan data menggunakan triangulasi dengan menggunakan metode induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menkankan pada makna daripada generalisasi.

Jenis data penelitian ini menggunakan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Sugiyono, 2018). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Data Sekunder wawancara dengan informan kungsi dan informan triangulasi.

Sedangkan pendekatan studi kasus (case study) adalah sebuah penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Studi kasus merupakan kajian dengan memberi batasan yang tegas terhadap suatu objek dan subjek peneliti tertentu, melalui pemusatan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci (Sugiyono, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari waktu ke waktu sejak momentum reformasi 1998 silam, reformasi birokrasi terus menggema dari satu orde pemerintahan ke orde pemerintahan berikutnya. Sejalan dengan tuntutan reformasi 1998 yang menandai berakhirnya Orde Baru itu, agenda ini menjadi program yang dikanunkan dalam program pemerintah, dengan maksud untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia. Namun, menjelang dua dasawarsa sejak reformasi 1998, wajah birokrasi belum sepenuhnya berubah total, bahkan cenderung masih jalan di tempat.

Sejatinya, tujuan reformasi birokrasi adalah membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang diembannya. Berbagai ikhtiar pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi sebenarnya telah dilakukan sejak dekade yang lalu. Gelombang pertama dari reformasi birokrasi secara formal dimulai pada tahun 2004 sampai dengan 2009. Sebagai rintisan

awal saat itu sifatnya masih terbatas instansional, dalam arti baru dilakukan oleh beberapa instansi atau lembaga pemerintah tertentu saja. Sasaran yang ingin dicapai dalam hal ini terbatas pada upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan area perubahan pada aspek kelembagaan, meliputi perubahan pada organisasi, budaya organisasi, ketatalaksanaan, regulasi dan deregulasi, serta sumber daya aparatur.

Gelombang kedua reformasi birokrasi dimulai pada 2010-2014, dimana pelaksanaannya bersifat nasional, dalam artian seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Secara konsepsi, sasaran yang hendak dicapai pun kian diperluas, yakni terwujudnya pemerintahan yang baik serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Sementara area perubahan meliputi aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya aparatur. Gelombang kedua dari reformasi birokrasi ditandai terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Dalam Perpres Nomor 81 tahun 2010, dinyatakan bahwa grand design dari reformasi birokrasi berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu tahun 2010-2025. Sedangkan road map reformasi birokrasi adalah bentuk operasionalisasi grand design tersebut yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan rencana rinci dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

Saat ini kita tengah berada di gelombang ketiga era reformasi birokrasi. Sesuai Peraturan Menpan & RB Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, peta jalan dari reformasi birokrasi gelombang ketiga ini didasarkan pada arah kebijakan pemerintah, yakni Nawacita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan Isu Strategis/Agenda Prioritas 2015-2019. Terkait Nawacita, pelaksanaan reformasi birokrasi mengacu kepada poin kedua, yaitu membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Untuk mewujudkan poin tersebut jelas dibutuhkan aparat birokrasi yang berkualitas, berorientasi kepada kepentingan publik, jujur, dan bersih dari praktik KKN.

Terkait isu strategis, ada enam agenda prioritas yang dijadikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu reformasi birokrasi nasional, akuntabilitas kinerja, pengawasan, kelembagaan birokrasi, ketatalaksanaan, dan SDM aparatur. Dilihat dari muatannya, keenam agenda prioritas tersebut mengarah pada perbaikan sistem dan reformasi pelaksanaan birokrasi. Di samping itu, dalam pelaksanaannya telah ditetapkan instansi pembina atau pelaksana dari keenam isu tersebut.

Sesungguhnya jika dilihat dari beragam perangkat regulatif menyangkut agenda perbaikan birokrasi, komitmen pemerintah sejak era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga era Joko Widodo ini telah banyak dilakukan. Ikhtiar itu muncul sebagai atas inisiatif pemerintah maupun lembaga legislatif. Ini bisa kita lihat dari lahirnya penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penyempurnaan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa, telah ditetapkannya Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui seleksi yang ketat demi memperoleh aparat birokrasi yang berkualitas, dan sebagainya.

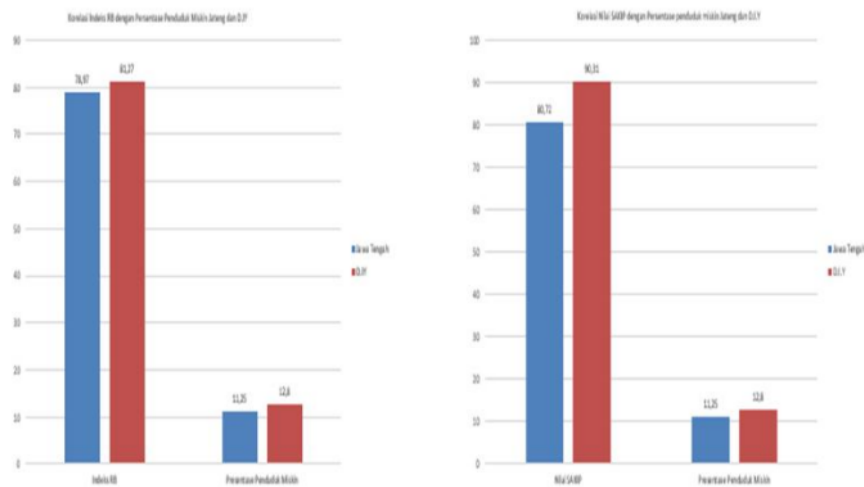
Namun, hasil-hasil yang dicapai tersebut belum sebanding dengan target-target yang diinginkan. Bahkan cenderung stagnan di tempat. Bisa diartikan bahwa reformasi birokrasi masih sebatas perubahan struktural, belum menyentuh persoalan budaya kerja ASN. Padahal, kedua aspek tersebut seharusnya berjalan seiringan dalam proses menciptakan ASN berkualitas dan menjawab kebutuhan zaman. Kenyataannya antara lain, praktik pungutan liar oleh aparatur negara, untuk sekedar mengambil salah satu contoh saja, masih menggurita sejak puluhan tahun lalu hingga kini. Data yang disampaikan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) menyebutkan, Satgas Saber Pungli berhasil menangkap 12.146 orang terlibat pungli dan menyita barang bukti senilai Rp 320,3 miliar. Sementara, pengaduan masyarakat terkait praktik pungli jumlahnya mencapai 36.127 aduan. Di bagian lain, sektor pelayanan publik yang paling banyak diadakan terjadi praktik pungli (52 persen), disusul sektor pendidikan (20 persen), hukum (8 persen), perizinan (5 persen), kepegawaian (5 persen), serta pengadaan barang/jasa (5 persen).

Ironisnya, hampir separuh dari kasus tersebut hanya dikenai sanksi administrasi, tidak diproses hukum pidana. Di samping praktek pungli, cukup banyak oknum ASN yang terlibat dalam praktik korupsi dan melakukan penyelewengan dalam menjalankan

tugas dan fungsinya sebagai aparat birokrasi. Yang menyedihkan, bahkan setelah dijatuhkan hukuman melakukan tindak pidana korupsi, mereka tidak diberhentikan sebagai ASN, masih menerima gaji dari negara.

Kemudian dengan adanya Reformasi Birokrasi berdampak atau Reformasi Birokrasi Tematik dengan 4 (empat) focus, yang salah satunya yaitu Refromasi Birokrasi Pengentasan Kemiskinan terdapat analisa dari penulis bahwa reformasi birkorasi yang baik belum tentu pengentasan kemiskinannya baik juga. Hal itu dapat ditemukan pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Yogyakarta merupakan salah satu Provinsi yang SAKIP dan Reformasi Birokrasinya paling tinggi diantara Provinsi lainnya. Namun menurut data BPS jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah lebih tertangani. Dapat dilihat pada grafik berikut

Tabel 1. korelasi Perbandingan SAKIP dan RB Dan Penduduk Miskin
Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah



Provinsi Jawa Tengah dalam pengentasan kemiskinan terus melakukan upaya yang lebih berdampak sehingga jumlah penduduk miskin bisa menurun. Namun upaya tersebut belum bisa menjamin Reformasi Birokrasinya mendapatkan nilai yang lebih baik pula.

Sehingga dengan adanya Reformasi Birokrasi Tematik yang telah dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai wujud Kementerian PANRB untuk menjawab arahan Presiden bahwa Reformasi Birokrasi harus berdampak. Pengentasan kemiskinan akan ditambahkan sebagai indikator penilaian yang harus dilaksanakan.

IV. KESIMPULAN

Fenomena birokrasi selalu ada bersama kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan setiap orang seringkali mengeluhkan cara berfungsinya birokrasi sehingga pada akhirnya orang akan beranggapan bahwa birokrasi tidak ada manfaatnya karena banyak disalahgunakan oleh pejabat pemerintah (birokratisme) yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya reformasi birokrasi

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokratis mensyaratkan kinerja dan akuntabilitas aparatur yang makin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi merupakan kebutuhan dan harus sejalan dengan perubahan tatanan kehidupan politik, kemasyarakatan, dan dunia usaha. Dalam peta tantangan nasional, regional, dan internasional, aparatur negara dituntut untuk dapat mewujudkan profesionalisme, kompetensi dan akuntabilitas. Pada era globalisasi, aparatur negara harus siap dan mampu menghadapi perubahan yang sangat dinamis dan tantangan persaingan dalam berbagai bidang. Saat ini masyarakat Indonesia sedang memasuki era yang penuh tuntutan perubahan serta antusiasme akan perubahan. Ini merupakan sesuatu yang di Indonesia tidak dapat dibendung lagi. Oleh karena itu, reformasi di tubuh birokrasi Indonesia harus terus dijalankan demi tidak terciptanya lagi patologi birokrasi di Indonesia.

Usaha untuk mendorong peningkatan kompetensi aparat birokrasi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, sebagai wujud profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, harus memerhatikan hal-hal berikut ini : 1) Peningkatan kesejahteraan aparat birokrasi pemerintah; 2) Peningkatan etika dan moral birokrasi pemerintah; 3) Peningkatan profesionalisme birokrasi pemerintah.

Masih ada kesempatan bagi pemerintah hingga masa berlaku Grand Design yang telah ditetapkan hingga 2025 berakhir, beberapa upaya perlu dilakukan dan ditingkatkan guna Reformasi Birokrasi di Indonesia bisa dikatakan berhasil, antara lain: 1) Diharapkan kepada Pemerintah untuk memperhatikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat; 2)

Untuk Peningkatan pelayanan, pemerintah harus memberikan pelayanan yang merata di berbagai aspek; 3) Masyarakat bukan hanya sebagai pihak yang dilayani tetapi juga pengawas pelayanan maka pemerintah haruslah memperbaiki system pelayanan hal ini di karenakan takutnya ketidak percayaan masyarakat kepada pemerintah yang menjalankan pelayanan; 4) Diharapkan mengajak peran masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, prinsip-prinsip good governance, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik, bersih, dan berwibawa, serta pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi; 5) Mengupayakan penataan perundang-undangan, dengan menyelesaikan rancangan undang-undang yang telah ada, Agar reformasi birokrasi guna mencegah buruknya birokrasi dapat berjalan dengan baik dengan adanya legalitas secara hukum dalam pelaksanaannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Reformasi Birokrasi di Indonesia masih berjalan secara normative. Pengumpulan dokumen dalam Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi masih menjadi prioritas Kementerian/Lemaga hingga Pemerintah Daerah. Selama ini reformasi birokrasi hanya focus pada sisi hulu, yakni melakukan perbaikan system dan manajemen internal instansi pemerintah untuk menyelesaikan tata Kelola birokrasi. Hal itu dinilai kurang berdampak ke masyarakat. anggaran pengentasan kemiskinan yang mencapai Rp 500 triliun di berbagai kementerian/lembaga belum mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. dana tersebut lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan perjalanan dinas, seminar, dan sebagainya, bukan fokus untuk mengentaskan kemiskinan.

Kementerian PANRB dirasa perlu meninjau ulang pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian/Lembaga hingga Pemerintah Daerah. Sehingga Pelaksanaan Reformasi Birokrasi benar-bena berdampak sesuai dengan arahan dan keinginan Bapak Preside Joko Widodo.

DAFTAR PUSTAKA

- Santosa, P. (2017). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance (Edisi Keempat)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Elysia, V., & Wihadanto, A. (2017). Sumartono, "Implementasi e-government untuk mendorong pelayanan publik yang terintegrasi di Indonesia.," *Optim. Peran Sains Dan Teknol. Untuk Mewujudkan Smart City*, 353–380.
- Widodo, S. E. (2015). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, A. (2017). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gajah Mada University Press.
- Yuningsih, R. (2016). *Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Di Kota Palu*. *Katalogis*, 4(8), 175–183
- Agustino, L. (2008). *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. <https://humas.jatengprov.go.id/sipelemkeprok#>
- Gaffar, Janedjri M., dkk (Edt.), 2003. *DPD dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Sekretariat Jenderal MPR dan UNDP*, Jakarta *Majalah Konstitusi* No. 74 ISSN: 1829-7692, edisi April 2013, hal 3.
- Rahmat Iman Cahyadi. *Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu-X/2012*. 2018, Hlm 5

Evaluasi Perencanaan Dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi Di Indonesia (Reformasi Birokrasi Tematik)

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	fasicha.com Internet Source	7%
2	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	4%
3	Putri Agustina, Nurbaiti Nurbaiti. "Manajemen Pelayanan Publik Pada Pengelolaan Data Di Unit Layanan Dinas Disdukcapil Kota Medan", Jurnal Minfo Polgan, 2023 Publication	2%
4	beritakotamakassar.com Internet Source	2%
5	beritanasional.id Internet Source	2%
6	ppjp.ulm.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



Evaluasi Perencanaan Dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi Di Indonesia (Reformasi Birokrasi Tematik)

Aditya Ari Nugroho¹, Munawar Noor², Charis Christiani³

UNTAG Semarang

Jl. Pawiyatan luhur Bendan Duwur Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: indra-kertati@untagsmg.ac.id¹, charis-christiani@untagsmg.ac.id³

Abstract

The bureaucratic reform process that began with the arrangement of the Grand Design (Grand Design) regarding the 2010-2025 Bureaucratic Reform (Grand Design Administration Reform 2010-2025) has been included in Presidential Regulation No. Bureaucratic reform is a political process designed to adjust the relationship between the bureaucracy and other elements in society, such as civil society and the private sector, as well as within the bureaucracy itself. In this grand design, the reform Road Map has been divided into 3 (three) phases every five years which contain strategic goals. It doesn't feel like the Grand Design of Bureaucratic Reform has entered its last stage or third period, in this last period the goal to be achieved is to continuously increase bureaucratic capacity as a continuation of bureaucratic reform in stage II until finally the ultimate goal is to create world-class government. However, many are of the opinion that in Stage I and Stage II there has been no significant impact, whether Bureaucratic Reform in Indonesia can be said to be "Going in Place". In this third stage, the PANRB Ministry launched Tematik Bureaucratic Reform with four focuses, namely: 1. Poverty Alleviation; 2. Investment Increase; 3. Acceleration of the President's Actual Priorities; 4. Digitalization of Government Administration. Bureaucratic Reform is expected to answer President Joko Widodo's wishes and mandate for Bureaucratic Reform that has an impact on society and development.

Keywords: *Bureaucratic Reform, Grand Design, Road Map, Thematic Bureaucratic Reform*

Abstrak

Proses reformasi birokrasi yang dimulai dengan penyusunan Desain Besar (grand design) mengenai Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Grand esign Administrative Reform 2010-2025) telah dituangkan ke dalam Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 dengan tujuan besarnya untuk menciptakan birokrasi berkelas dunia di tahun 2025. Reformasi birokrasi merupakan sebuah proses politik yang di desain untuk menyesuaikan hubungan antara birokrasi dan elemen-elemen lain dalam masyarakat, seperti masyarakat sipil dan swasta, maupun di dalam birokrasi itu sendiri. Dalam desain besar tersebut, Road Map reformasi telah dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap setiap lima tahunan yang memuat sasaran-sasaran strategis. Tidak terasa Grand Design Reformasi Birokrasi tersebut telah memasuki pada tahap terakhir atau periode ketiga, pada periode terakhir ini sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan secara terus menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada tahap II hingga akhirnya tujuan akhir untuk mewujudkan pemerintah kelas dunia. Namun banyak berpendapat bahwa pada Tahap I

dan Tahap II dinilai belum ada dampak yang signifikan, apakah Reformasi Birokrasi di Indonesia bisa dikatakan “Jalan di Tempat”. Pada tahap ketiga ini Kementerian PANRB mencanangkan Reformasi Birokrasi Tematik dengan empat focus yaitu: 1. Pengentasan Kemiskinan; 2. Peningkatan Investasi; 3. Percepatan Prioritas Aktual Presiden; 4. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Reformasi Birokrasi diharapkan menjawab keinginan dan amanat Bapak Presiden Joko Widodo untuk Reformasi Birokrasi yang berdampak pada masyarakat dan pembangunan.

Kata kunci: Reformasi Birokrasi, Grand Design, Road Map, Reformasi Birokrasi Tematik

I. LATAR BELAKANG

Istilah Reformasi Birokrasi memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat maupun pemerintah. Hal ini berkaitan dengan tuntutan masyarakat agar pemerintah segera mereformasi birokrasinya sesuai pernyataan Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan lima visi Indonesia Maju sebagai arah kebijakannya di periode kedua pemerintahannya di Sentul 14 Juli 2019.

Visi yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini diharapkan dapat membawa Indonesia dalam menghadapi tantangan fenomenal global yang dinamis, cepat, kompleks, beresiko dan penuh kejutan/fenomena VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity). Salah satu visi yang disampaikan adalah Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata Kelola pemerintahan yang baik. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional negara tersebut. Hasil yang di-harapkan dari reformasi birokrasi adalah ter-ciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN (korupsi, Kolusi, Nepotisme) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program reformasi birokrasi. Hal ini jelas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, bahwa kecepatan melayani serta birokrasi akuntabel, efektif, dan efisien menjadi kunci bagi terwujudnya reformasi birokrasi kita.

Dari sudut pandang masyarakat, birokrasi selama ini dianggap sebagai sesuatu yang menyulitkan, berbelit-belit, dan tidak profesional, biaya tinggi dan sarat dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Terjadinya kesan negatif dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah/birokrasi diakibatkan karena birokrasi selama ini tidak dapat

merespon keinginan warga masyarakat. Konsep lama birokrasi kemudian dinilai tidak lagi mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat yang sangat pesat sehingga birokrasi tidak lagi mampu memenuhi tuntutan masyarakat tersebut. Birokrasi lama yang didesain untuk bekerja lambat, berhati-hati, dan metodologis sudah tidak dapat diterima oleh konsumen yang memerlukan pelayanan cepat, efisien, tepat waktu, dan simpel (sederhana). Sehingga Reformasi Birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparturnya dapat berkualitas lebih baik lagi.

Guna pelaksanaan reformasi birokrasi, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan beberapa pedoman teknis penerapan reformasi birokrasi. Di samping itu masih ada banyak lagi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang merupakan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map Reformasi Birokrasi nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024 telah masuk pada tahap ketiga atau periode terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara merupakan Kementerian yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, salah satu visi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi. Terbaru dalam usahanya meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melalui arahan Presiden Joko Widodo yaitu Reformasi Birokrasi harus berdampak langsung terhadap masyarakat dan pembangunan, telah di launching Reformasi Birokrasi Tematik yang dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.

Terdapat empat hal yang menjadi fokus dari program RB tematik ini. Fokus tersebut adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual Presiden. Untuk program

prioritas Presiden terbagi menjadi dua, yakni peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian laju inflasi.

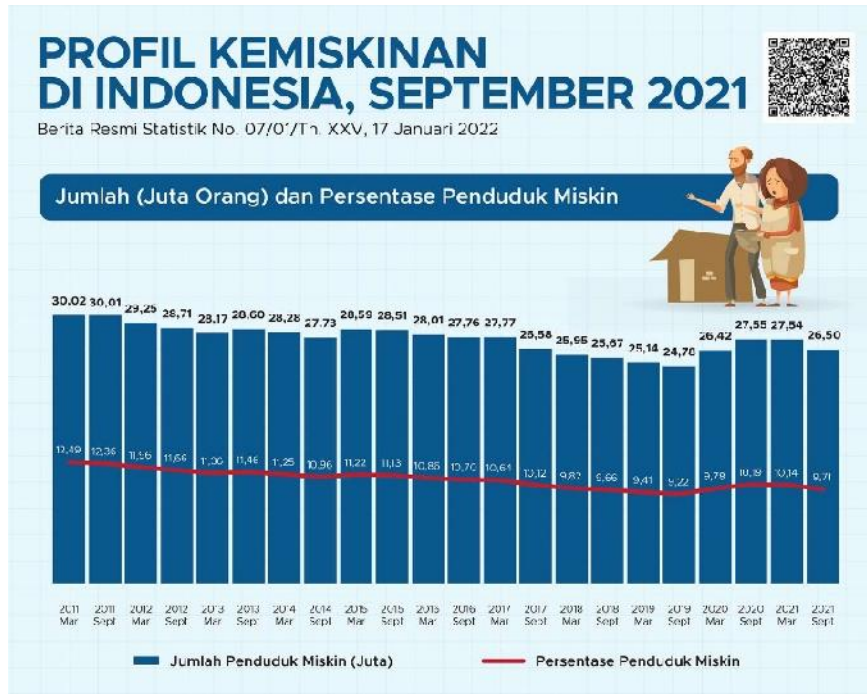
Melalui program RB tematik ini, diharapkan instansi pemerintah dapat menjalankan program dengan fokus pada penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat melalui keempat fokus tersebut. Sehingga, dampak RB yang dilakukan oleh pemerintah, terasa dan berdampak di lapisan masyarakat. Sebelum dilaksanakannya reformasi birokrasi tematik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menggencarkan Pembangunan Mall Pelayanan Publik. Mall Pelayanan Publik merupakan wujud akselerasi pemerintah dalam menyediakan satu tempat pelayanan yang terintegrasi. Dengan MPP, masyarakat bisa dengan mudah mengurus berbagai layanan barang, jasa dan administrasi, baik dari sektor perizinan maupun non-perizinan.

Permasalahan

Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir tersebut, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Periodisasi perjalanan Reformasi Birokrasi di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan paradigma ilmu administrasi dan tata Kelola pemerintahan yang berkembang di dunia. Upaya perbaikan tata kelola pemerintah dilakukan dengan mencari paradigma terbaik yang dapat dipraktikkan di lapangan. Secara umum, Indonesia mengarah pada praktik paradigma *New Public Management*, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi padahasil, serta *New Public Service (Governance)* yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media masa. Meskipun demikian, pada beberapa kondisi Indonesia masih menerapkan beberapa praktik birokrasi weberian, khususnya dalam mengelola pelayanan yang bersifat strategis dan terkait dengan kedaulatan negara. Sehingga muncul Mall Pelayanan Publik yang dimana merupakan usaha Pemerintah untuk memberikan masyarakat kemudahan untuk mendapatkan pelayanan.

Selain Mall Pelayanan Publik, terdapat Reformasi Birokrasi Tematik sebagai wujud Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam menerjemahkan arahan presiden untuk Reformasi Birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat dan pembangunan. Reformasi Birokrasi Tematik tersebut, terdapat focus antara lain: 1.) Penanggulangan Kemiskinan, Tata Kelola birokrasi agar besarnya anggaran kemiskinan berdampak optimal pada angka penurunan kemiskinan. Sembilan Pemda menjadi *pilot project* pada tahap pertama, dan 23 Pemda pada tahap kedua; 2.) Peningkatan Investasi, Reformasi Birokrasi memperkuat penerapan omnibus law, meningkatkan competitiveness index, untuk melipatgandakan investasi menjadi indeks reformasi birokrasi bagi Kementria/Lembaga/Pemda; 3.) Perepatan Prioritas Aktual Presiden, Penguatan tata Kelola birokrasi merespons dan mengawal hal-hal mendesak sesuai arahan Bapak Presiden, sehingga dapat memitigasi resiko yang berdampak serius pada masyarakat; 4.) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Terciptanya birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital untuk memudahkan rakyat, berbasis struktur digital, budaya digital, dan kompetensi digital pada birokrasi.

Selama ini reformasi birokrasi hanya focus pada sisi hulu, yakni melakukan perbaikan system dan manajemen internal instansi pemerintah untuk menyelesaikan tata Kelola birokrasi. Hal itu dinilai kurang berdampak ke masyarakat. anggaran pengentasan kemiskinan yang mencapai Rp 500 triliun di berbagai kementerian/lembaga belum mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. dana tersebut lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan perjalanan dinas, seminar, dan sebagainya, bukan fokus untuk mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia dirasa masih tinggi data yang diperoleh oleh BPS.



Gambar 1. Profil Kemiskinan di Indonesia September 2021



Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau

Berdasarkan data diatas, Jumlah Penduduk miskin di Indonesia yaitu 26,50 Juta Jiwa dengan presentase 9,71%. Sedangkan penduduk miskin menurut pulau pada perkotaan sejumlah 11,86 juta jiwa dengan presentase 7,60%, pada perdesaan sejumlah 14,64 juta jiwa dengan 12,53%. Permasalahannya adalah, dengan adanya reformasi

brokrasi tematik saat ini yang salah satu fokusnya yaitu pengentasan kemiskinan. Apakah akan berdampak terhadap perbaikan kondisi kemiskinan di Indonesia.

Tujuan

Tujuan penulisan artikel ini untuk menunjukkan serangkaian penjelasan antara lain: Menganalisis Implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi apakah sudah tepat guna dan berdampak; Menganalisis pengaruh adanya Reformasi Birokrasi Tematik, khususnya Pengentasan Kemiskinan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan.

Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami (Sugiyono, 2018).

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan focus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan.

Penelitian kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara, studi dokumen. Sedangkan kesahihan dan keterandalan data menggunakan triangulasi dengan menggunakan metode induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menkankan pada makna daripada generalisasi.

Jenis data penelitian ini menggunakan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Sugiyono, 2018). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Data Sekunder wawancara dengan informan kungsi dan informan triangulasi.

Sedangkan pendekatan studi kasus (case study) adalah sebuah penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Studi kasus merupakan kajian dengan memberi batasan yang tegas terhadap suatu objek dan subjek peneliti tertentu, melalui pemusatan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci (Sugiyono, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari waktu ke waktu sejak momentum reformasi 1998 silam, reformasi birokrasi terus menggema dari satu orde pemerintahan ke orde pemerintahan berikutnya. Sejalan dengan tuntutan reformasi 1998 yang menandai berakhirnya Orde Baru itu, agenda ini menjadi program yang dikanunkan dalam program pemerintah, dengan maksud untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia. Namun, menjelang dua dasawarsa sejak reformasi 1998, wajah birokrasi belum sepenuhnya berubah total, bahkan cenderung masih jalan di tempat.

Sejatinnya, tujuan reformasi birokrasi adalah membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang diembannya. Berbagai ikhtiar pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi sebenarnya telah dilakukan sejak dekade yang lalu. Gelombang pertama dari reformasi birokrasi secara formal dimulai pada tahun 2004 sampai dengan 2009. Sebagai rintisan

awal saat itu sifatnya masih terbatas instansional, dalam arti baru dilakukan oleh beberapa instansi atau lembaga pemerintah tertentu saja. Sasaran yang ingin dicapai dalam hal ini terbatas pada upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan area perubahan pada aspek kelembagaan, meliputi perubahan pada organisasi, budaya organisasi, ketatalaksanaan, regulasi dan deregulasi, serta sumber daya aparatur.

Gelombang kedua reformasi birokrasi dimulai pada 2010-2014, dimana pelaksanaannya bersifat nasional, dalam artian seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Secara konsepsi, sasaran yang hendak dicapai pun kian diperluas, yakni terwujudnya pemerintahan yang baik serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Sementara area perubahan meliputi aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya aparatur. Gelombang kedua dari reformasi birokrasi ditandai terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Dalam Perpres Nomor 81 tahun 2010, dinyatakan bahwa grand design dari reformasi birokrasi berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu tahun 2010-2025. Sedangkan road map reformasi birokrasi adalah bentuk operasionalisasi grand design tersebut yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan rencana rinci dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

Saat ini kita tengah berada di gelombang ketiga era reformasi birokrasi. Sesuai Peraturan Menpan & RB Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, peta jalan dari reformasi birokrasi gelombang ketiga ini didasarkan pada arah kebijakan pemerintah, yakni Nawacita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan Isu Strategis/Agenda Prioritas 2015-2019. Terkait Nawacita, pelaksanaan reformasi birokrasi mengacu kepada poin kedua, yaitu membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Untuk mewujudkan poin tersebut jelas dibutuhkan aparat birokrasi yang berkualitas, berorientasi kepada kepentingan publik, jujur, dan bersih dari praktik KKN.

Terkait isu strategis, ada enam agenda prioritas yang dijadikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu reformasi birokrasi nasional, akuntabilitas kinerja, pengawasan, kelembagaan birokrasi, ketatalaksanaan, dan SDM aparatur. Dilihat dari muatannya, keenam agenda prioritas tersebut mengarah pada perbaikan sistem dan reformasi pelaksanaan birokrasi. Di samping itu, dalam pelaksanaannya telah ditetapkan instansi pembina atau pelaksana dari keenam isu tersebut.

Sesungguhnya jika dilihat dari beragam perangkat regulatif menyangkut agenda perbaikan birokrasi, komitmen pemerintah sejak era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga era Joko Widodo ini telah banyak dilakukan. Ikhtiar itu muncul sebagai atas inisiatif pemerintah maupun lembaga legislatif. Ini bisa kita lihat dari lahirnya penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penyempurnaan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa, telah ditetapkannya Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui seleksi yang ketat demi memperoleh aparat birokrasi yang berkualitas, dan sebagainya.

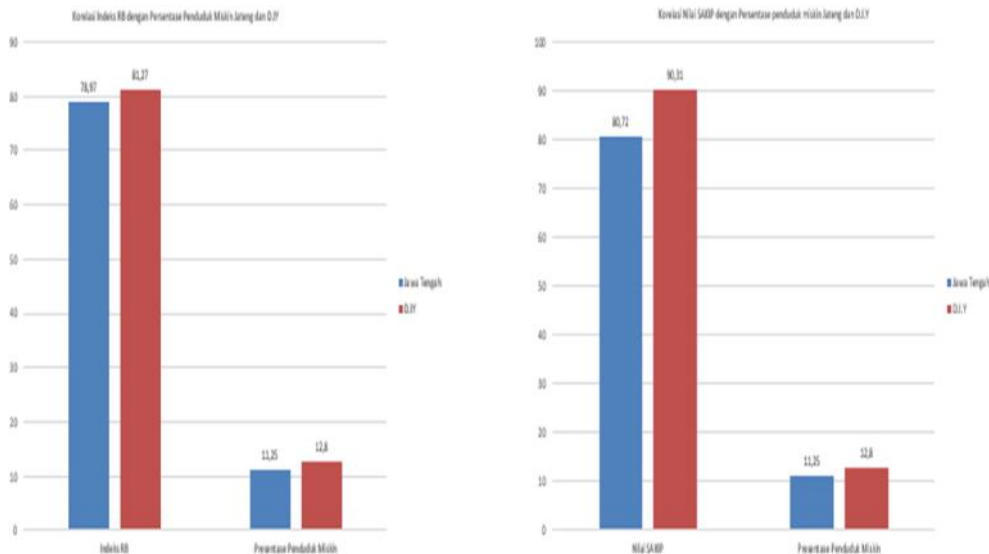
Namun, hasil-hasil yang dicapai tersebut belum sebanding dengan target-target yang diinginkan. Bahkan cenderung stagnan di tempat. Bisa diartikan bahwa reformasi birokrasi masih sebatas perubahan struktural, belum menyentuh persoalan budaya kerja ASN. Padahal, kedua aspek tersebut seharusnya berjalan seiringan dalam proses menciptakan ASN berkualitas dan menjawab kebutuhan zaman. Kenyataannya antara lain, praktik pungutan liar oleh aparatur negara, untuk sekedar mengambil salah satu contoh saja, masih menggurita sejak puluhan tahun lalu hingga kini. Data yang disampaikan Satuan Tugas Sapu Besih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) menyebutkan, Satgas Saber Pungli berhasil menangkap 12.146 orang terlibat pungli dan menyita barang bukti senilai Rp 320,3 miliar. Sementara, pengaduan masyarakat terkait praktik pungli jumlahnya mencapai 36.127 aduan. Di bagian lain, sektor pelayanan publik yang paling banyak diadakan terjadi praktik pungli (52 persen), disusul sektor pendidikan (20 persen), hukum (8 persen), perizinan (5 persen), kepegawaian (5 persen), serta pengadaan barang/jasa (5 persen).

Ironisnya, hampir separuh dari kasus tersebut hanya dikenai sanksi administrasi, tidak diproses hukum pidana. Di samping praktek pungli, cukup banyak oknum ASN yang terlibat dalam praktik korupsi dan melakukan penyelewengan dalam menjalankan

tugas dan fungsinya sebagai aparat birokrasi. Yang menyedihkan, bahkan setelah dijatuhkan hukuman melakukan tindak pidana korupsi, mereka tidak diberhentikan sebagai ASN, masih menerima gaji dari negara.

Kemudian dengan adanya Reformasi Birokrasi berdampak atau Reformasi Birokrasi Tematik dengan 4 (empat) focus, yang salah satunya yaitu Refromasi Birokrasi Pengentasan Kemiskinan terdapat analisa dari penulis bahwa reformasi birkorasi yang baik belum tentu pengentasan kemiskinannya baik juga. Hal itu dapat ditemukan pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Yogyakarta merupakan salah satu Provinsi yang SAKIP dan Reformasi Birokrasinya paling tinggi diantara Provinsi lainnya. Namun menurut data BPS jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah lebih tertangani. Dapat dilihat pada grafik berikut

Tabel 1. korelasi Perbandingan SAKIP dan RB Dan Penduduk Miskin Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah



Provinsi Jawa Tengah dalam pengentasan kemiskinan terus melakukan upaya yang lebih berdampak sehingga jumlah penduduk miskin bisa menurun. Namun upaya tersebut belum bisa menjamin Reformasi Birokrasinya mendapatkan nilai yang lebih baik pula.

Sehingga dengan adanya Reformasi Birokrasi Tematik yang telah dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai wujud Kementerian PANRB untuk menjawab arahan Presiden bahwa Reformasi Birokrasi harus berdampak. Pengentasan kemiskinan akan ditambahkan sebagai indikator penilaian yang harus dilaksanakan.

IV. KESIMPULAN

Fenomena birokrasi selalu ada bersama kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan setiap orang seringkali mengeluhkan cara berfungsinya birokrasi sehingga pada akhirnya orang akan beranggapan bahwa birokrasi tidak ada manfaatnya karena banyak disalahgunakan oleh pejabat pemerintah (birokratisme) yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya reformasi birokrasi

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokratis mensyaratkan kinerja dan akuntabilitas aparatur yang makin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi merupakan kebutuhan dan harus sejalan dengan perubahan tatanan kehidupan politik, kemasyarakatan, dan dunia usaha. Dalam peta tantangan nasional, regional, dan internasional, aparatur negara dituntut untuk dapat mewujudkan profesionalisme, kompetensi dan akuntabilitas. Pada era globalisasi, aparatur negara harus siap dan mampu menghadapi perubahan yang sangat dinamis dan tantangan persaingan dalam berbagai bidang. Saat ini masyarakat Indonesia sedang memasuki era yang penuh tuntutan perubahan serta antusiasme akan perubahan. Ini merupakan sesuatu yang di Indonesia tidak dapat dibendung lagi. Oleh karena itu, reformasi di tubuh birokrasi Indonesia harus terus dijalankan demi tidak terciptanya lagi patologi birokrasi di Indonesia.

Usaha untuk mendorong peningkatan kompetensi aparat birokrasi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, sebagai wujud profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, harus memerhatikan hal-hal berikut ini : 1) Peningkatan kesejahteraan aparat birokrasi pemerintah; 2) Peningkatan etika dan moral birokrasi pemerintah; 3) Peningkatan profesionalisme birokrasi pemerintah.

Masih ada kesempatan bagi pemerintah hingga masa berlaku Grand Design yang telah ditetapkan hingga 2025 berakhir, beberapa upaya perlu dilakukan dan ditingkatkan guna Reformasi Birokrasi di Indonesia bisa dikatakan berhasil, antara lain: 1) Diharapkan kepada Pemerintah untuk memperhatikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat; 2)

Untuk Peningkatan pelayanan, pemerintah harus memberikan pelayanan yang merata di berbagai aspek; 3) Masyarakat bukan hanya sebagai pihak yang dilayani tetapi juga pengawas pelayanan maka pemerintah haruslah memperbaiki system pelayanan hal ini di karenakan takutnya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah yang menjalankan pelayanan; 4) Diharapkan mengajak peran masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, prinsip-prinsip good governance, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik, bersih, dan berwibawa, serta pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi; 5) Mengupayakan penataan perundang-undangan, dengan menyelesaikan rancangan undang-undang yang telah ada, Agar reformasi birokrasi guna mencegah buruknya birokrasi dapat berjalan dengan baik dengan adanya legalitas secara hukum dalam pelaksanaannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Reformasi Birokrasi di Indonesia masih berjalan secara normative. Pengumpulan dokumen dalam Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi masih menjadi prioritas Kementerian/Lemaga hingga Pemerintah Daerah. Selama ini reformasi birokrasi hanya focus pada sisi hulu, yakni melakukan perbaikan system dan manajemen internal instansi pemerintah untuk menyelesaikan tata Kelola birokrasi. Hal itu dinilai kurang berdampak ke masyarakat. anggaran pengentasan kemiskinan yang mencapai Rp 500 triliun di berbagai kementerian/lembaga belum mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. dana tersebut lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan perjalanan dinas, seminar, dan sebagainya, bukan fokus untuk mengentaskan kemiskinan.

Kementerian PANRB dirasa perlu meninjau ulang pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementeria/Lembaga hingga Pemerintah Daerah. Sehingga Pelaksanaan Reformasi Birokrasi benar-bena berdampak sesuai dengan araha dan keinginan Bapak Preside Joko Widodo.

DAFTAR PUSTAKA

- Santosa, P. (2017). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance (Edisi Keempat)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Elysia, V., & Wihadanto, A. (2017). Sumartono, "Implementasi e-government untuk mendorong pelayanan publik yang terintegrasi di Indonesia,." *Optim. Peran Sains Dan Teknol. Untuk Mewujudkan Smart City*, 353–380.
- Widodo, S. E. (2015). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, A. (2017). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gajah Mada University Press.
- Yuningsih, R. (2016). *Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Di Kota Palu*. *Katalogis*, 4(8), 175–183
- Agustino, L. (2008). *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. <https://humas.jatengprov.go.id/sipelemkeprok#>
- Gaffar, Janedjri M., dkk (Edt.), 2003. *DPD dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Sekretariat Jenderal MPR dan UNDP, Jakarta *Majalah Konstitusi No. 74* ISSN: 1829-7692, edisi April 2013, hal 3.
- Rahmat Iman Cahyadi. *Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu-X/2012*. 2018, Hlm 5